BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi terhadap pengangguran terdidik di Indonesia. Penelitian menggunakan metode Generalized Method of Moments (GMM) dengan data panel dari 34 provinsi selama periode 2018-2023.

IPM terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik. Meskipun IPM mencerminkan peningkatan kualitas hidup, akses pendidikan, dan kesehatan, peningkatan IPM dapat mendorong jumlah penduduk berpendidikan tinggi yang tidak seimbang dengan penciptaan lapangan kerja yang sesuai. Hal ini memunculkan fenomena mismatch antara kualifikasi lulusan dan kebutuhan pasar kerja, sehingga berkontribusi pada meningkatnya pengangguran di kalangan terdidik. Fenomena ini sejalan dengan konsep structural unemployment dalam ekonomi tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik. Ketika ekonomi tumbuh, aktivitas produksi dan investasi meningkat, yang pada akhirnya memperbesar kapasitas penyerapan tenaga kerja, termasuk lulusan berpendidikan tinggi. Temuan ini mendukung teori Okun yang menyatakan bahwa pertumbuhan output ekonomi berkorelasi negatif dengan tingkat pengangguran.

Sementara itu, UMP juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik. Kenaikan UMP meningkatkan daya tarik sektor formal dan mendorong tenaga kerja berpendidikan untuk masuk ke pasar kerja, karena upah yang lebih tinggi dianggap sepadan dengan kompetensi mereka. Selain berfungsi sebagai alat perlindungan sosial, UMP juga berperan sebagai sinyal yang dapat meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja dan mempercepat proses matching antara pencari kerja dan lowongan yang tersedia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengangguran terdidik tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan pendidikan dan pertumbuhan

ekonomi, tetapi juga oleh dinamika struktur pasar kerja dan kebijakan pengupahan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM melalui IPM harus diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang relevan, pertumbuhan sektor produktif yang inklusif, serta pengelolaan kebijakan upah minimum yang adaptif. Sinergi antara kebijakan pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan sangat penting untuk menekan pengangguran terdidik secara berkelanjutan di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia pada periode 2018–2023, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesesuaian antara Pendidikan dan Pasar Kerja, pemerintah disarankan untuk memperkuat integrasi antara lembaga pendidikan tinggi dan dunia industri guna mengurangi mismatch antara kualifikasi lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan kurikulum berbasis kompetensi yang melibatkan pelaku industri, pengembangan program magang terstruktur, serta pelatihan kerja berbasis vokasi. Perlu juga dilakukan tracer study secara nasional untuk menilai relevansi lulusan dengan pasar kerja dan sebagai bahan evaluasi kurikulum.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Menyerap Tenaga Kerja Terampil, mengingat pertumbuhan ekonomi terbukti menurunkan tingkat pengangguran terdidik, pemerintah perlu mendorong ekspansi ekonomi melalui investasi pada sektor-sektor padat karya terampil dan berteknologi menengah-tinggi yang mampu menyerap lulusan pendidikan tinggi. Dukungan dapat berupa pemberian insentif fiskal kepada industri yang menyerap tenaga kerja terdidik, perluasan program padat karya di sektor modern, serta penguatan iklim usaha berbasis teknologi dan inovasi.

3. Penetapan UMP yang Adaptif dan Mendukung Daya Serap Tenaga Kerja, temuan bahwa UMP berdampak negatif signifikan terhadap pengangguran terdidik menunjukkan perlunya kebijakan upah minimum yang tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga mendorong penyerapan tenaga kerja formal.

Pemerintah disarankan untuk menetapkan UMP secara adaptif dengan mempertimbangkan produktivitas dan kemampuan dunia usaha, serta memastikan implementasi dan kepatuhan pelaksanaannya di lapangan. UMP juga perlu dimanfaatkan sebagai instrumen sinyal pasar untuk meningkatkan minat kerja lulusan terdidik pada sektor formal.

4. Perluasan Akses dan Kualitas Pembangunan Manusia, peningkatan IPM harus diiringi dengan strategi pembangunan manusia yang tidak hanya fokus pada akses pendidikan dan kesehatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan keterhubungan dengan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah dapat memperluas beasiswa pendidikan tinggi untuk wilayah 3T, membangun politeknik atau kampus vokasi di daerah, serta memperkuat layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang mendukung produktivitas tenaga kerja terdidik.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA